



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman http:kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rudy Mas'ud
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian sanksi berupa:

- a. Berdasarkan Nilai SAKIP:
 1. Predikat CC dikenakan pemotongan TPP sebesar 50%.
 2. Predikat C dikenakan pemotongan TPP sebesar 70%.
 3. Predikat D dikenakan pemotongan TPP sebesar 80%.
- b. Berdasarkan Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja:
Tambahan pemotongan TPP sebesar 10% bagi Kepala Perangkat Daerah yang tidak mencapai target.

Adapun mekanisme pemotongan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 09 Februari 2026

PIHAK KEDUA

Gubernur Kalimantan Timur,

Rudy Mas'ud

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah,

Sri Wahyuni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Kredibel	Indeks Kualitas Kebijakan	60,00
		Nilai AKIP Pemerintah Daerah	79,19
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor EKPPD	3,48
3.	Meningkatnya Kualitas Rancangan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Indeks Reformasi Hukum	91,00
		Nilai Capaian aksi HAM	70,00
4.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesra	60,00
5.	Meningkatnya Akses dan Capaian Pendidikan Tinggi di Kalangan Penduduk Usia Produktif	Persentase penduduk usia >15 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi	80,00
6.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	60,00
7.	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program unggulan daerah yang sesuai target	83,00
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,00
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	49,00
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	9,00
10.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase unit layanan yang memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) $\geq 3,0$	25,00
11.	Meningkatkan kualitas layanan umum dan rumah tangga Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan pengguna layanan umum dan rumah tangga Sekretariat Daerah	86,50
12.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,05
		Indeks kepuasan layanan Administrasi Pimpinan	82,00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 272.286.851.693	APBD
2.	Program Penataan Organisasi	Rp 1.361.696.846	APBD
3.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 6.017.419.925	APBD
4.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp 1.615.017.769.499	APBD
5.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 1.837.107.020	APBD
6.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.810.238.154	APBD
7.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 3.796.662.453	APBD
8.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 18.885.375.913	APBD
	Jumlah	Rp 1.921.013.121.503	

Samarinda, 09 Februari 2026

PIHAK KEDUA

Gubernur Kalimantan Timur,



Rudy Mas'ud

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah,



Sri Wahyuni